



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. LAPORAN Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2026

Plt. Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



[Handwritten Signature]
BUDI-UTAMA, S.STP.,M.Si

NIP. 19830515 200112 1 004

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 **“Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi”**

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

a. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE, Formulasi Perhitungan :

$$= \frac{\text{Jumlah total domain}}{\text{Jumlah 4 area penilai}}$$

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 4.20; sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 4.11. Dengan demikian capaian ini tidak sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 97.86%.
- Tidak tercapainya target ini dikarenakan masih kurangnya regulasi internal yang mendukung implementasi serta aspek layanan public yang belum terdigitalisasi secara menyeluruh.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 4.11 besaran nilai yang didapat sama.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi PD Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Integrasi system dan data lintas Perangkat daerah;
 2. Penguatan jaringan dan peningkatan Data Center terstandar;
 3. Peningkatan kualitas dan ketersediaan SDM Digital melalui Upskilling dan Reskilling ASN bidang TIK;
 4. Kampanye literasi digital masyarakat yang lebih merata untuk terwujudnya transformasi layanan public digital yang optimal.
 5. Modernisasi infrastruktur dan layanan public berbasis digital.
2. Capaian sasaran strategis 2 **“Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral”**:
- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Laju pemanfaatan data sektoral (%), Formulasi Perhitungan :
$$= (n + 1) - n/n \times 100\% \quad (n = \text{data tahun awal})$$
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 80%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 80%. Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 70% terjadi peningkatan sebesar 10%.
3. Capaian sasaran strategis 3 **“Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE”**:

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI), Formulasi Perhitungan :
Perhitungan Indeks KAMI Versi 4.1 = Jumlah total Area penilaian Aspek Indeks KAMI
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 465, sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 463. Dengan demikian capaian ini tidak sesuai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 99.57%.
- Tidak tercapainya target ini dikarenakan masih belum optimalnya pengelolaan aset yang mendukung Security operating center (SOC) dlm rangka monitoring kejadian2 anomali dalam aplikasi maupun jaringan.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 367 terjadi kenaikan sebesar 16,97%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan infrastruktur Security operating center dlm rangka monitoring kejadian2 anomali dalam aplikasi maupun jaringan;
2. Peningkatan SDM yang memiliki kompetensi keamanan informasi (sertifikasi, pengalaman teknis).

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	9
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	11
1.3 Isu-isu Strategis.....	12
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	12
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	16
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2025	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	21
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2025	26
3.3. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN	33

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	14
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025	15
Tabel II.1 Sasaran Strategis Diskominfo Pemerintah Prov Kep. Bangka Belitung	17
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	17
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	18
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	18
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Diskominfo Tahun 2025.....	19
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	21
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025	22
Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran 1	24
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja	25
Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025	27

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Diskominfo Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Diskominfo Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10
Gambar II.1. Website Diskominfo Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung.....	10
Gambar II.2. Layanan Pengaduan Melalui Website Diskominfo Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10

BAB I

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau 5APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Bab I berisi :

1. *Pohon Kinerja PD*
2. *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025*

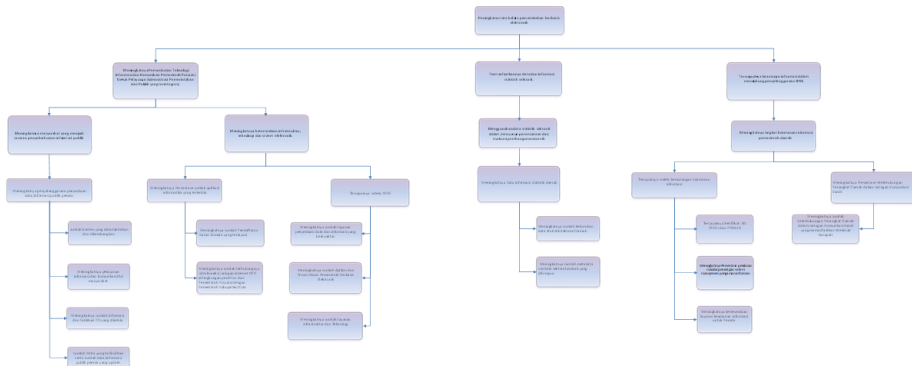
1.1 Pohon Kinerja

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Di dalam pohon kinerja kita dapat melihat crosscutting kaitan/hubungan dengan Instansi Lain baik itu instansi vertikal maupun antar perangkat daerah.

Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (logic model) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan. Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

POHON KINERJA DISKOMINFO PROV. BABEL RPD 2023-2026

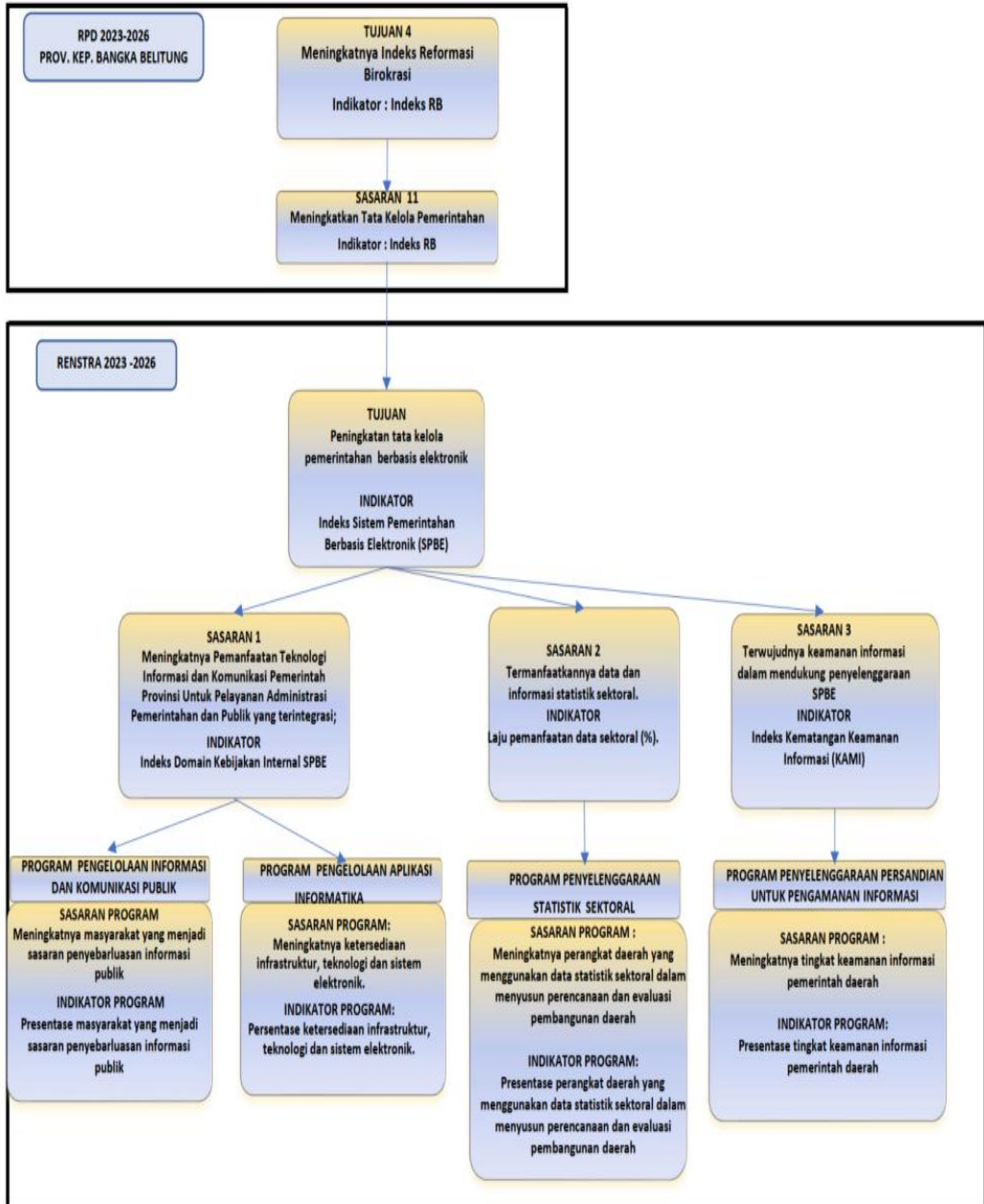


1.2 *Cascading* Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan antara *cascading* kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Gambar I.1 Cascading Kinerja



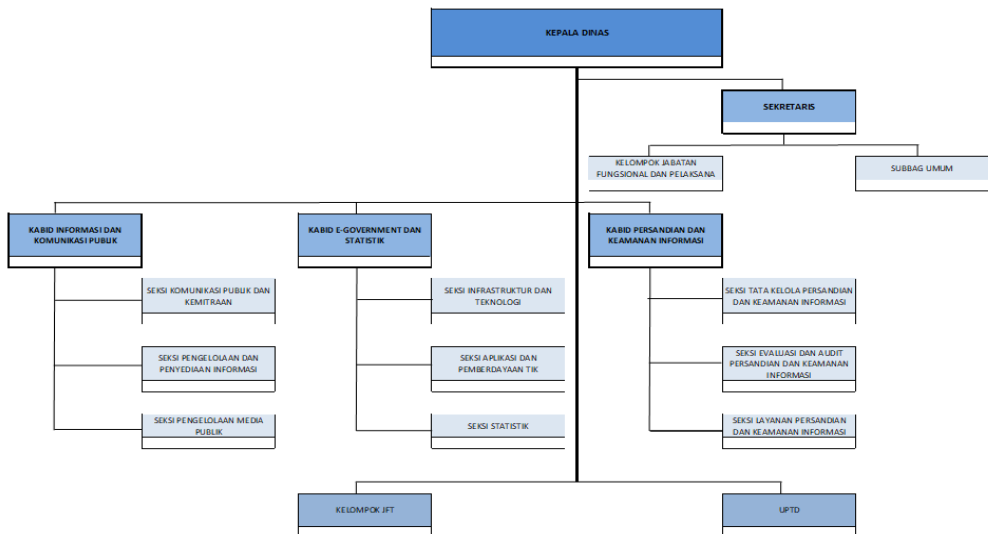
Sumber : RPD 2023 - 2026, Renstra Diskominfo Prov. Kep. Babel 2023 - 2026

I.2 Peta Proses Bisnis

IDENTIFIKASI PETA PROSES						
PETA PROSES (KODE)	SUB PETA PROSES (KODE)	SUB PETA PROGRAM	STRATEGI PROGRAM	KODE	PETA LINTAS FUNGSI CFM	BIDANG IKP
Meningkatnya layanan publikasi, informasi dan komunikasi publik (KOMINFO.01)	KOMINFO.01.01	Meningkatkan layanan publikasi, informasi dan komunikasi publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	KOMINFO.01.01 CFM.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
Meningkatnya layanan penerapan e-Government (KOMINFO.02)	KOMINFO.02.01	Meningkatkan penerapan e-Government untuk Layanan Pemerintah dan publik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	KOMINFO.02.01 CFM.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	E-GOVERNMENT DAN STATISTIK
Meningkatkan layanan penyediaan data dan statistik (KOMINFO.03)	KOMINFO.03.01	Meningkatnya layanan penyediaan data dan statistik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	KOMINFO.03.01 CFM.01	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	E-GOVERNMENT DAN STATISTIK
Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). (KOMINFO.04)	KOMINFO.04.01	Meningkatkan keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	KOMINFO.04.01 CFM.01	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	E-GOVERNMENT DAN STATISTIK
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (KOMINFO.05)	KOMINFO.05.01	Meningkatnya Akuntabilitas PD serta Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	KOMINFO.04.01 CFM.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sendi Antar Perangkat Daerah Provinsi	PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOMINFO.05.01 CFM.01	Meningkatkan Akutabilitas Perangkat Daerah Melalui perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	SEKRETARIAT
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan	KOMINFO.05.01 CFM.02	Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah melalui pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	SEKRETARIAT
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan	KOMINFO.05.01 CFM.03	Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	SEKRETARIAT
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan	KOMINFO.05.01 CFM.04	Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SEKRETARIAT
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan	KOMINFO.05.01 CFM.05	Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SEKRETARIAT
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan	KOMINFO.05.01 CFM.06	Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SEKRETARIAT
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan	KOMINFO.05.01 CFM.07	Meningkatnya tata kelola internal Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SEKRETARIAT

I.3 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.2.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Adapun Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan provinsi;
2. Penyusunan program dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika;
4. Pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
5. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi;
6. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
7. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

8. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PETA JABATAN	
JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JABATAN PELAKSANA
JABATAN STRUKTURAL	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
KEPALA DINAS	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIS DINAS	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
KABID INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PENATA LAPORAN KEUANGAN
KABID E-GOVERMENT DAN STATISTIK	BENDAHARA
KABID PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM	VERIFIKATOR KEUANGAN
JABATAN FUNGSIONAL	PENGELOLA KEPEGAWAIAN
JF PERENCANA AHLI MUDA	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR
JF MANGGALA INFORMATIKA MADYA	PENGADMINISTRASI UMUM
JF SANDIMAN MADYA	ANALIS PUBLIKASI

JF PRANATA KOMPUTER MADYA	PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI
JF PRANATA HUMAS MADYA	PENGOLAH INFORMASI DAN KOMUNIKASI
JF STATISTISI MADYA	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI
JF ANALIS KEBIJAKAN MUDA	JURNALIS
JF MANGGALA INFORMATIKA MUDA	ANALIS SISTEM INFORMASI
JF SANDIMAN MUDA	PENGADMINISTRASI ANALISIS DAN KEMITRAAN MEDIA
JF PRANATA KOMPUTER MUDA	PENGAWAS TEKNOLOGI INFORMASI
JF PRANATA HUMAS MUDA	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN
JF STATISTISI MUDA	PENGENDALI TEKNOLOGI INFORMASI
JF. PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER
JF PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	ANALIS DATA DAN INFORMASI
PRANATA KOMPUTER PENYELIA	PENGELOLA DATA STATISTIK
JF ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN	PENGELOLA KEAMANAN SISTEM INFORMASI
JF ARSIPARIS PENYELIA	ANALIS TATA KELOLA KEAMANAN SIBER
JF PRANATA HUMAS PELAKSANA LANJUTAN /MAHIR	PENGENDALI TEKNOLOGI INFORMASI

JF PRANATA HUMAS PELAKSANA/TERAMPIL	PENGOLAH DATA KEAMANAN SIBER DAN SANDI
JF PRANATA HUMAS PERTAMA	ANALIS PERSANDIAN
JF PRANATA HUMAS PENYELIA	PENGELOLA DATA PERSANDIAN
JF PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	
JF PRANATA KOMPUTER PERTAMA	
PRANATA KOMPUTER PENYELIA	
PRANATA KOMPUTER MAHIR	
JF STATISTISI PERTAMA	
STATISISI PENYELIA	
STATISISI MAHIR	
STATISISI TERAMPIL	
JF MANGGALA INFORMATIKA PERTAMA	
JF PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	
JF PRANATA KOMPUTER PENYELIA	
JF MANGGALA INFORMATIKA PELAKSANA	
JF SANDIMAN PERTAMA	
SANDIMAN PENYELIA	

SANDIMAN MAHIR	
SANDIMAN TERAMPIL	
JF SANDIMAN MUDA	
JF PRANATA KOMPUTER MUDA	
JF PRANATA HUMAS MUDA	

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas”**, antara lain sebagai berikut:

1. Keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang akuntabel Pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik saat ini menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan. Dengan adanya keterbukaan, diharapkan proses kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dapat dilakukan secara transparan. Sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal

ini sejalan dengan tujuan goodgovernance yakni Badan Publik dapat menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat, serta menjalankan kegiatan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan yang berarti bagi masyarakat luas. Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku PPID Utama Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu di lingkup Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar senantiasa mempublikasikan informasi yang dimiliki di setiap badan publik kepada masyarakat melalui berbagai media yang dimiliki Badan Publik. Disamping mempublikasikan informasi kepada masyarakat, Badan Publik juga dituntut untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dengan menyiapkan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pendukung transformasi digital pemerintahan SPBE Merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dengan pengelolaan SPBE dapat mendukung transformasi digital terutama di sektor pemerintahan. Transformasi digital

merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Namun untuk menjawab tantangan transformasi digital yang sudah dicanangkan Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan beberapa upaya strategis dalam pengelolaan SPBE. Kebijakan yang berkaitan dengan SPBE di Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertuang dalam Perda No. 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3. Meningkatnya layanan penerapan e-Government, Pengelolaan data terpadu dan terintegrasi sebagai wujud kesatuan pemakaian data pembangunan yang terpadu Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua stakeholder dalam berkontribusi untuk mewujudkan visi daerah. Meskipun pemanfaatan teknologi sudah begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Dibutuhkan Big Data untuk mendukung peningkatan layanan publik kepada masyarakat;
4. Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semakin menguatkan bahwa urusan persandian yang beradadi bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penyelenggaraan SPBE, Pengamanan informasi harus mampu mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan

Komunikasi yang sangat pesat sehingga mendukung peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN				PEGAWAI YANG ADA				JENIS KELAMIN			
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI- LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
A	JABATAN STRUKTURAL												
1	Jabatan Tinggi Pratama	1	1			0							
2	Jabatan Administrator	4	4			3	2	1			3		
3	Jabatan Pengawas	1	1			1		1				1	
B	JABATAN FUNGSIONAL												
1	Manggala Informatika Ahli Madya	2	2			0							
2	Pranata Komputer Ahli Madya	2	2			1	1				1		
3	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	2	2			0							
4	Statistisi Ahli Madya	1	1			0							
5	Sandiman Ahli Madya	1	1			0							
6	Manggala Informatika Ahli Muda	4	4			2	2				2		
7	Pranata Komputer Ahli Muda	6	6			6	6				4	2	
8	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	7	7			5	3	2			1	4	
9	Statistisi Ahli Muda	3	3			1	1					1	
10	Sandiman Ahli Muda	3	3			1			1		1		
11	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1			1		1			1		
12	Perencana Ahli Muda	1	1			1			1		1		
13	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	1	1			0							
14	Manggala Informatika Ahli Pertama	1	1			0							
15	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	5	5			1		1				1	
16	Statistisi Ahli Pertama	1	1			0							
17	Sandiman Ahli Pertama	1	1			0							
18	Pranata Komputer Penyelia	4		4		0							
19	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	2		2		0							
20	Statistisi Penyelia	1		1		0							
21	Sandiman Penyelia	1		1		0							
22	Pranata Komputer Mahir	3		3		2		1	1		1	1	
23	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	3		3		2		1	1			2	
24	Statistisi Mahir	1		1		0							
25	Sandiman Mahir	1		1		0							
26	Pranata Komputer Terampil	2		2		0							
27	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	2		2		0							
28	Statistisi Terampil	1		1		0							
29	Sandiman Terampil	1		1		0							
30	Arsiparis Mahir	1		1		1			1		1		
31	Manggala Informatika Pelaksana	1		1		0							
						0							

C	JABATAN PELAKSANA					0						
1	Penata Laporan Keuangan	1		1		1		1			1	
2	Bendahara	2			2	2		2			1	1
3	Verifikasi Keuangan	3			3	2			2			2
4	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1		1		0						
5	Pengelola Sarana dan Prasarana	1			1	0						
6	Pengelola Kepegawaian	1			1	1			1			1
7	Pengadministrasian Umum	2				2	0					
8	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1		1		1		1			1	
9	Pengelola Program dan Kegiatan	1			1	0						
10	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	1				1	0					
11	Analisis Tata Kelola Keamanan SIBER	1		1		0						
12	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	1			1	0						
13	Pengelola Data Keamanan SIBER dan Sandi	1			1	0						
14	Pengendali Teknologi Informasi	3		3		2		2			2	
15	Analisis Persandian	1		1		0						
16	Pengelola Data Persandian	1			1	1			1			1
17	Pengawas Teknologi Informasi	1		1		1		1			1	
18	Pengelola Sistem dan Jaringan	1			1	0						
19	Penata Teknologi Informasi Komputer	1				1	1		1		1	
20	Analisis Data dan Informasi	2		2		1			1			1
21	Pengelola Data Statistik	1			1	0						
22	Analisis Publikasi	2		2		2		2				2
23	Pengadministrasian Data Penyajian dan Publikasi	2				2	2			2	2	
24	Pengolah Informasi dan Komunikasi	2				2	2			2	1	1
25	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	2		2		1		1			1	
26	Jurnalis	3			3	2			2		2	
27	Pengadministrasian Analisis dan Kemitraan Media	2				2	2			2		2
28	Analisis Sistem Informasi	1		1		0						
D	PPPK/PHL											
	PPPK											
1	Pranata Komputer Ahli Pertama	4		4		4			4		3	1
	PHL											
1	Caraka	2				2	2		1	1	2	
2	Petugas Kebersihan	3				3	3			3	2	1
3	Sopir	2				2	1			1	1	
4	Satpam	2				2	2			2	2	
5	Staf Administrasi	8		3		5	8		5		3	6
6	Informasi Teknologi (Fotografer/Vidografer)	5		5		5	5		5		4	1
7	Pengelola Media	6		6		6			4	2	6	
8	Operator Call Center	2			2	1			1		1	
9	New Anchor	1		1		1			1			1
10	Penyiar Radio	5		3	2		4		2	2	3	1

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 32 orang (35,96%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 15 orang (16,85%), D3 sebanyak 22 orang (24,72%), SLTA sebanyak 20 orang (22,47%), dan S3 sebanyak 1 orang. Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
1	Tanah		
	Tanah	1	Rp 20,132,935
2	Peralatan & Mesin		
	Alat Besar	3	Rp 535,852,250
	Alat Angkutan	5	Rp 935,889,124
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2	Rp 6,986,850
	Alat Pertanian	-	Rp -
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	60	Rp 3,950,550,697
	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	32	Rp 3,133,589,699
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	Rp -
	Alat Laboratorium	-	Rp -
	Alat Persenjataan	-	Rp -
	Komputer/Laptop	110	Rp 11,651,078,230
	Alat Eksplorasi	-	Rp -
	Alat Pengeboran	-	Rp -
	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	Rp -
	Alat Bantu Eksplorasi	-	Rp -
	Alat Keselamatan Kerja	-	Rp -

	Alat Peraga	-	Rp	-
	Peralatan Proses/Produksi	-	Rp	-
	Rambu-Rambu	-	Rp	-
	Peralatan Olah Raga	-	Rp	-
3	Gedung dan Bangunan			
	Bangunan Gedung	5	Rp	4,403,923,417
	Monumen	-	Rp	-
	Bangunan Menara	1	Rp	893,600,000
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	Rp	-
4	Jalan, Irigasi & Jaringan			
	Jalan dan Jembatan	-	Rp	-
	Bangunan Air	1	Rp	134,000,000
	Instalasi	2	Rp	10,500,000
	Jaringan	-	Rp	-
5	Asset Tetap Lainnya		Rp	-
	Buku Perpustakaan	-	Rp	-
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	Rp	-
	Hewan	-	Rp	-
	Biota Perairan	-	Rp	-
	Tanaman	-	Rp	-
	Barang Koleksi Non Budaya	-	Rp	-
	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	Rp	-
6	Konstruksi dlm pengerjaan			
	Konstruksi dlm pengerjaan	1	Rp	49,800,000
7	ASET LAINNYA			
	Aset Tak Berwujud	22	Rp	1,122,682,000
	Total			26,848,585,202.00

Kendaraan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 2 unit kendaraan operasional, 2 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi,

dan toilet*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain*) sudah tersedia dalam walaupun dalam kondisi kurang baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 2 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana masih kurang memadai. Hanya saja sebanyak 40 % dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga kurang mendukung dalam tuntutan pekerjaan yang 80 % berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2024	Rp. 20.459.639.747,00	Rp. 314.090.500,00	-	-	Rp. 20.773.730.247,00
2025	Rp. 19.135.878.892,67	Rp. 569.088.072,00	-	-	Rp. 19.704.966.964,67

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 dibanding tahun 2024 terdapat penurunan) Total anggaran belanja sebesar Rp 1.068.763.282,33 Hal ini menunjukkan ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah ***Mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)*** Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi;;

2. Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral.;
3. Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE.
4. Meningkatkan Tata Kelola Internal PD

Adapun sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis ..Dinas Komunikasi dan Informatika 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi;	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai		2.7	2.8	4.2	4.3	4.3	SGT BAIK
2.	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral.	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	%		55	70	80	100	100	SGT BAIK
3.	Terwujudnya keamanan informasi	Indeks Kematangan Keamanan	nilai		3	3	4	4	4	SGT BAIK

	dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Informasi (KAMI)								
4.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	nilai		82	83	84	85	85	SGT BAIK/TINGGI/SEDANG

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana induk SPBE. 2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK. 3. Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi. 4. Meningkatkan Layanan Pengaduan Elektronik. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan penguatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi dan komunikasi publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Penguatan ketersediaan data dan informasi sektoral melalui diseminasi open data. 3. Penguatan persandian untuk pengamanan informasi. 4. Penguatan pengelolaan dan peningkatan kualitas pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik
2.	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral; 2. Meningkatkan diseminasi data badan publik. 	
3.	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah; 2. Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah. 3. Menyusun pedoman standar keamanan informasi dan persandian daerah. 	

4.	Meningkatkan Tata Kelola Internal PD	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja 2. Meningkatkan kapasitas SDM; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja; 4. Meningkatkan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1. Peningkatan perencanaan dan evaluasi yang komprehensif. 2. Penguatan kapasitas SDM. 3. Penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 4. Penguatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan.
----	--------------------------------------	---	--

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/Berkurang
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1 Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11,831,791,530.00	10,541,703,012.67	(1,290,088,517.33)
	1.1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67,522,000.00	23,640,000.00	(43,882,000.00)
	1.1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,626,045,316.00	8,551,598,141.67	(1,074,447,174.33)
	1.1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)

		1.1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	223,979,555.00	163,940,601.00	(60,038,954.00)
		1.1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34,883,859.00	29,154,372.00	(5,729,487.00)
		1.1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,711,685,800.00	1,632,289,898.00	(79,395,902.00)
		1.1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147,675,000.00	141,080,000.00	(6,595,000.00)
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi	1.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4,186,007,200.00	3,988,873,900.00	(197,133,300.00)
		1.2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	4,186,007,200.00	3,988,873,900.00	(197,133,300.00)
		1.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4,676,966,500.00	4,616,301,100.00	(60,665,400.00)
		1.3.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	77,500,000.00	77,500,000.00	-
		1.3.2	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	4,599,466,500.00	4,538,801,100.00	(60,665,400.00)
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
3	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral	1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	190,999,400.00	134,919,900.00	(56,079,500.00)
		1.4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	190,999,400.00	134,919,900.00	(56,079,500.00)
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
4	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	472,922,630.00	423,169,052.00	(49,753,578.00)
		1.5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	472,922,630.00	423,169,052.00	(49,753,578.00)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran				21,358,687,260.00	19,704,966,964.67	(1,653,720,295.33)

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 050/2.3/DISKOMINFO/2025 tanggal 02 Januari 2025 (sebagaimana terlampir).

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya.

2.5.1 Perjanjian Kinerja 2025 (Induk)

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi;	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	nilai	4.20	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	4.2
2.	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral.	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	%	80	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	15 25 30 15
3.	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	1	465	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	 465

Tabel II.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 4,186,007,200	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2	Persentase Jumlah layanan Infrastruktur teknologi dan kapasitas layanan publik pemerintah berbasis e-Government	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 4,676,966,500	Bidang Egovernment dan Statistik
3	Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 190,999,400	Bidang Egovernment dan Statistik
4	Presentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 472,922,630	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 11,831,791,530	Sekretariat

2.5.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Perubahan Kesatu)

Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena dengan dikeluarkannya Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024,

melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/191/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 yaitu “ agar memenuhi melakukan perbaikan indikator kinerja menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya”, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom sasaran dan indikator kinerja. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kesatu) Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor : / /BA/Diskominfo Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi;	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	nilai	4.20	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	4.2
2.	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral.	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	%	80	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	15 25 30 15
3.	Terwujudnya keamanan informasi	Indeks Kematangan	1	465	Triwulan I Triwulan II	

	dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Keamanan Informasi (KAMI)			Triwulan III	
					Triwulan IV	465

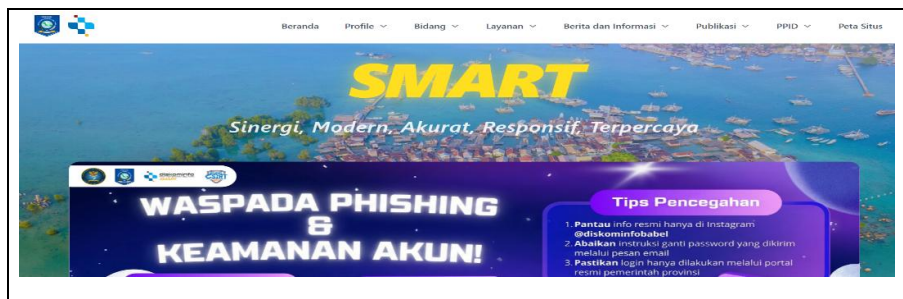
Tabel II.7 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 3,988,873,900	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2	Persentase Jumlah layanan Infrastruktur teknologi dan kapasitas layanan publik pemerintah berbasis e-Government	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 4,616,301,100	Bidang Egovernment dan Statistik
3	Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 134,919,900	Bidang Egovernment dan Statistik
4	Presentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 423,169,052	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 10,541,703,013	Sekretariat

2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat <https://kominfo.babelprov.go.id>. Di dalam website ini memuat profil lengkap beserta tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga menu untuk pengaduan, pelayanan masyarakat, dan prosedur pelayanan masyarakat yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti <https://www.lapor.go.id/>.

Gambar II.2. Website Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2025*
2. *Efisiensi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Penghargaan*
5. *Lintas Sektor/Crosscutting*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	6	6	7	8	9=8/7*100%	10	11=7
1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	nilai	2.70	3.14	4.20	4.11	97,86%	SGT BAIK	4.20
		<u>Formula Perhitungan:</u> =(Jumlah total domain)/(Jumlah 4 area penilaian)								
2	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral	Laju pemanfaatan data sektoral	%	35	55	80	80	100%	SGT BAIK	100
		<u>Formula Perhitungan:</u> =(n+1)-n/n)x 100% (n=data tahun awal)								
3	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	nilai		367/2.6	3/465	3.6/463	99.57%	SGT BAIK	4
		<u>Formula Perhitungan:</u> Perhitungan Indeks KAMI Versi 4.1 = Jumlah total Area penilaian Aspek Indeks KAMI								

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi

Kinerja sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi diukur dengan indikator Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	$=(\text{Jumlah total domain})/(\text{Jumlah 4 area penilaian})$

Kinerja sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan $=(\text{Jumlah total domain})/(\text{Jumlah 4 area penilaian})$. Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 4.11) contoh) atau sebesar 97,86% dari target 4.20. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kep. Babel pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator/Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Domain Kebijakan Interna SPBE	2.8	4.11	146.79	4.20	4.11	97,86		137.00

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Tercapai 4,11 (kolom 7), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 97,86 % (kolom 8) (terlampaui/belum melampaui*).
- Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 97,86% (data Lkj Tahun lalu) indikator sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi masih sama dengan capaian tahun lalu.
- Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai/tidak tercapai

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik** dengan sasaran program Meningkatnya masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik mempunyai Indikator Persentase masyarakat yang

menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi / jumlah penduduk x 100% Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 100 atau sebesar 100%.

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut :

- Ketersediaan dan peran media serta saluran-saluran komunikasi diantaranya berupa media cetak/surat kabar, media elektronik (TV dan Radio) dan media baru (website dan Media sosial) yang membantu dalam menyebarkan sekaligus menerima informasi dan pesan-pesan baik dari dan kepada internal pemerintah maupun dari dan kepada masyarakat luas,
- Tersedianya anggaran untuk pengelolaan informasi dan komunikasi publik meskipun dengan jumlah yang masih terbatas tetapi masih mampu mendukung berjalannya program pengelolaan informasi dan komunikasi public dengan baik.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dapat lebih optimal,
2. **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** dengan sasaran kinerja program Meningkatnya ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik mempunyai Indikator kinerja Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah PD yang terlayani infrastruktur teknologi/keseluruhan layanan X 100% Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 90% dari target 90% atau sebesar 100%. Capaian kinerja

pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 80%.

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut :

- Optimalisasi Data center sebagai Implementasi dari kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan digitalisasi pemerintahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
- Pengembangan aplikasi dipemerintahan untuk mempermudah integrasi data dan efisien dari sisi anggaran untuk operasional maupun pemeliharannya,
- Koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait aplikasi yang dikembangkan yang dilaksanakan secara efektif dan intensif.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan infrastruktur layanan Data Center,
- Peningkatan kapasitas SDM IT yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan aplikasi, pengembangan atau pemeliharaan.

Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2025

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
1.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi / jumlah penduduk x 100%	*	100	*	100	*	100
2.	Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik Jumlah PD yang terlayani infrastruktur teknologi/keseluruhan layanan X 100%		90		90		100

- a. Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik berada diatas Target Nasional..
- b. Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik berada diatas Target Nasional.
- c. Sebagai kesimpulan capaian indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik berada diatas capaian Nasional yaitu sebesar 100 % dan capaian indikator Persentase

ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik sama dengan capaian Nasional yaitu sebesar 100 %

3.1.1.1. Data Dukung Capaian Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik melekat pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan sebagai berikut, yaitu :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp . 3.988.873.900,-

Gambar III.1
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Pelaksanaan Uji publik money keterbukaan informasi tahun 2025

2.		Workshop penyusunan strategi komunikasi publik, 11 nov 2025
3.		Peliputan pengambilan video program strategis pemda

3.1.1.2 Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika melekat pada Bidang E-Government dan Statistik kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp . 77.500.000,-
- b. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp . 4.538.801.100,-

Gambar III.3
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah
Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Workshop Ruang Digital “Penerapan Teknologi Internet of Things (IoT) Dalam Penyelenggaraan Layanan Digital Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2.		<p>Pemindahan access point Perbaikan jaringan internet dan migrasi unifikasi ke controller baru</p>

3.1.2. Sasaran 2: Termanfaatkannya data dan informasi statistik sectoral

Kinerja sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi diukur dengan indikator Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Termanfaatannya data dan informasi statistik sektoral.	Laju pemanfaatan data sektoral	$'=(n+1)-n/n) \times 100\%$ (n=data tahun awal)

Kinerja sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan $'=(n+1)-n/n) \times 100\%$ (n=data tahun awal) Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 80% dari target 80%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.10. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Laju pemanfaatan data sektoral	70	70	100	80	80	100	100	80

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 80 (kolom 7), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100 % (kolom 8) (terlampau).
- b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 70% (data Lkj Tahun

lalu) indikator sasaran Laju pemanfaatan data sektoral mengalami peningkatan sebesar 10%.

- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Laju pemanfaatan data sektoral peningkatan capaian tersebut didukung dari program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan sasaran program Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah formula perhitungan indikator ini adalah $'=(n+1)-n/n \times 100\%$ (n=data tahun awal) Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 80% dari target 80 atau sebesar 100%.


Capaian ini didukung oleh :

- Koordinasi serta Dukungan dari OPD dalam penyampaian data serta Dukungan Badan Pusat Statistik dalam memberi pembinaan, bimbingan dan fasilitasi
- Kebijakan yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan statistik sektoral,
- Ketersediaan data yang akurat dan relevan dalam mendukung analisis statistik.

3.1.1.2. Data Dukung Capaian Laju pemanfaatan data sektoral melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- a. Program Penyelenggaraan Statistik sektoral melekat pada Bidang E-Government dan Statistik pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp . 134.919.900,-

Gambar III.12
 Program Penyelenggaraan Statistik sektoral
 Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p style="text-align: center;">Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral tgl 2-3 Des 2025</p>
2.		<p style="text-align: center;">Bimbingan Teknis Proses Bisnis Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral dalam Mewujudkan Percepatan Transformasi Digital</p>

3.1.2. Sasaran : Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE

Kinerja sasaran Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE diukur dengan indikator Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.12. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	= Jumlah total Area penilaian Aspek Indeks KAMI

Kinerja sasaran Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan = Jumlah total Area penilaian Aspek Indeks KAMI Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 463 dari target 465. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.10. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	3	2.85	95.00	3/465	3/463	99,57	4	4

Analisis Ketercapaian Sasaran Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 463, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 99,57 % tidak terlampaui.

- b. Dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 367 indikator sasaran Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE mengalami peningkatan sebesar 79.26%
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) peningkatan capaian tersebut didukung dari program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan sasaran program Meningkatkan tingkat keamanan informasi pemerintah daerah.

Capaian ini didukung oleh :

- Kelembagaan sudah cukup optimal dan sesuai,
- Dukungan lembaga pengampu (BSSN) dalam memberi pembinaan, bimbingan dan fasilitasi,
- Semangat ASN dalam mengembangkan diri dan berkontribusi dalam bidang yang baru dikembangkan cukup membantu.

Capaian ini mengalami kendala sebagai berikut :

- Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang persandian yang memiliki keahlian khusus,
- Keterbatasan anggaran yang dapat membatasi pengadaan software, hardware dan layanan keamanan informasi yang diperlukan.

3.1.2.2. Data Dukung Capaian Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi melekat pada Bidang Persandian dan keamanan informasi pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi di Lingkup Daerah Provinsi dengan

anggaran sebesar Rp . 423.169.052.

Gambar III.12
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah
Daerah Provinsi di Lingkup Daerah Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Bimteks TTIS se Kab/Kota Prov. Kep. Bangka Belitung</p>
2.		<p>Pengukuhan Tim tanggap Insiden Cyber se Kab/Kota Prov. Kep. Bangka Belitung</p>

3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	4.20	4.11	97.86	8,605,175,000	8,350,292,465	97.04%	254,882,535.00
2.	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral	Laju pemanfaat data sektoral	80	80	100	134,919,900	130,372,171	96.63%	4,547,729.00
3.	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	465	463	99.57	423,169,052	400,968,025	94.75%	22,201,027.00
Total Belanja						9,163,263,952	8,881,632,661	96.14%	3.86%

Sumber: *http:SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2024, Laporan Keuangan Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024*

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2024 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 9,163,263,952,- terealisasi Rp 8,881,632,661,- atau 96.14% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 281.631.291,- yang bersumber dari:

- Efisiensi Belanja Operasi serta Efisiensi Belanja Modal

3.3 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/115/LHE/ITDA/2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2024 telah disusun Tindak lanjut adalah sebagai berikut :

Tabel III.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No. LHE : 700/115/LHE/ITDA/2025

Nilai Hasil Evaluasi : 77.60

Tingkat Akuntabilitas Kinerja : BB (Sangat baik)

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAKLANJUT	TARGET	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN/OUTPUT	REALISASI (JADWAL TENTATIF PELAKSANAAN)				LINK DOKUMEN BUKTI DUKUNG
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	Setiap unit/satuan kerja Sekretariat/Bidang/Bagian) memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja seluruh pegawai	5 dokumen	Januari	Sudah dilaksanakan	V				https://drive.google.com/drive/folders/12j773jgtVvYfFbEIV0ZgnPvUAd81W2usp-sharin8
2	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Menyusun dan mensiasiasikan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pemantauan capaian kinerja secara berjenjang lingkup unit organisasi perangkat daerah, serta melakukan rapat evaluasi kinerja secara berjenjang mulai dari Ketua tlm kerja, Kepala Bidang hingga Kepala Dinas	1 Dokumen	Agustus	Sedang dalam tahap pelaksanaan (On Progress) - SOP Pemantauan Capaian Kinerja Secara Berjenjang lingkup OPD	-	-	V	-	https://drive.google.com/drive/folders/13ei20f8JmB4_x0yH77h5mNMh1E73M5Fv7usp-sharin8
3	Mendapatkan pelaporan kinerja dari masing-masing bidang	Pengumpulan laporan kinerja rutin dengan penunjukan PIC pelaporan pada masing - masing bidang dengan menggunakan google form atau spreadsheet	4 dokumen	Pertriwulan	Dilaksanakan pada TW 3 dan 4	-	-	V	V	https://drive.google.com/drive/folders/13bklle_dEDLRQENg(PwtecnTiar1cu7usp-sharin8
4	Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan	Penyusunan laporan dokumentasi kegiatan berbasis hasil kerja oleh tiap unit dan atau /bidang	4 dokumen/ unit kerja	Triwulan II dan III	Dalam perencanaan awal	-	-	-	V	https://drive.google.com/drive/folders/17bnZ5jd690V7L0KAvac8l9FuR06S5uY3usp-sharin8
5	Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi terkait pelaporan kinerja yang belum memuat informasi strategi perbaikan kedepan	Melakukan monitoring dan evaluasi serta analisis atas kesesuaian rencana dan realisasi kerja di tiap unit dan atau/ bidag	6 dokumen	Pertriwulan	Sebagian sudah dilaksanakan bersamaan dengan laporan Dalev	V	V	V	V	https://drive.google.com/drive/folders/1NgDg_gln74_3zWk8tuyPvcYf9s3l8k7usp-sharin8

Mengetahui,
Pit. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



GUSDINAR, S.IP.
NIP. 19690813 198903 1 002

3.4 Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Aplikasi Laporan, untuk layanan aspirasi pengaduan secara online dan responsive dalam pelayanan public,
- c. Aplikasi Lentera , Layanan elektronik, Teknologi dan Informatika dalam penyelenggaraan SPBE Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan mewujudkan akuntabilitas pemerintah dan mempermudah public dalam mengakses dan menggunakan data serta menghasilkan system pemerintahan yang transparan,
- e. Portal Tim CSirt-Babelprov memberikan layanan yang meliputi respon insiden dalam bentuk: triase insiden; koordinasi insiden; dan resolusi insiden. Disertai dengan aktivitas proaktif dalam bentuk: *cyber security drill test; workshop* atau bimbingan teknis; dan asistensi pembentukan CSIRT sektor Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

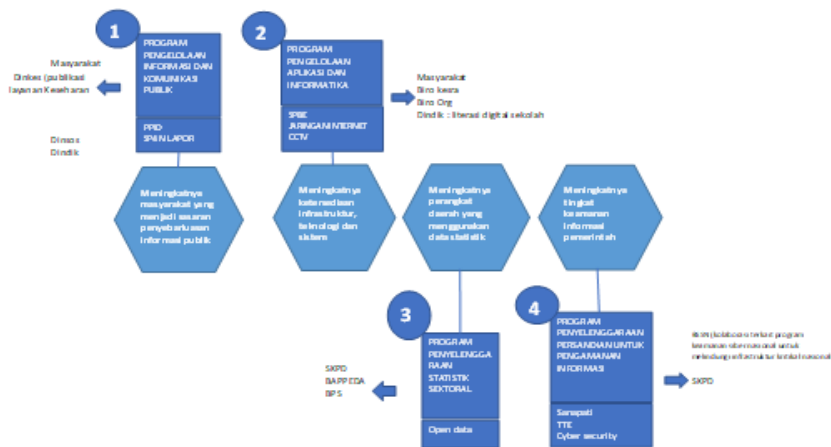
3.5 Penghargaan

Sepanjang Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. Anugerah IMDI Nasional, TOP 3 Provinsi dengan nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI);
2. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 dengan kualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;
3. Penghargaan sebagai Provinsi ke 3 yang telah melaksanakan pembentukan Tim Tanggap insiden Siber (TTIS) organisasi sector Pemerintahan seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kep. Babel.

3.6 Crosscutting

Cross cutting adalah penjabaran dari instansi atau Perangkat Daerah mana saja yang bekerjasama dengan PD... Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan program kerjanya



BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi*
3. *Rencana Aksi*

4.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2025, indikator kinerja Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE tercapai dengan presentase 146,79%, namun untuk indikator kinerja Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) tidak tercapai dengan presentase 99,57%.
2. untuk keberhasilan tercapainya kinerja tidak lepas dari visi yang jelas dari pemimpin untuk membangun pemerintahan yang berbasis digital untuk bahan penentuan sasaran, tersedianya jaringan internet yang cepat dan stabil, regulasi yang mendukung dalam pengembangan SPBE. terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan adanya sosialisasi yang efektif serta partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan berbasis elektronik dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan untuk mendukung program kegiatan Dinas komunikasi dan informatika dalam upaya penerapan teknologi dan informasi.

4.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan visi pimpinan agar lebih jelas mendukung penuh tentang transformasi digital dalam upaya peningkatan Indeks SPBE dan Indeks KAMI.
2. Peningkatan kapasitas SDM denan pelaksanaan pelatihan yang berkelanjutan terkait dengan pengelolaan data, keamanan siber serta pengembangan aplikasi.
3. Pengembangan infrastruktur TIK berupa ketersediaan jaringan internet yang memadai dan stabil diseluruh wilayah, meningkatkan kapasitas data center sesuai standar yang ada, Update perangkat lunak dan perangkat keras.
4. Pengembangan aplikasi dan layanan berbasis TIK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Peningkatan keamanan siber berupa kebijakan yang komprehensif, penerapan system keamanan yang kuat seperti firewall, anti virus dll.
6. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala serta menetapkan indicator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan program.

4.3 Rencana Aksi

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan

Pemerintah Pusat.

2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi dan komunikasi internal Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih intensif.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang intensif melalui berbagai media dan saluran komunikasi, mengadakan forum konsultasi public secara berkala untuk menjangkau aspirasi masyarakat.
5. Membangun system informasi yang terintegrasi untuk mempermudah pengelolaan data, monitoring dan evaluasi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi;	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3.14	4.11	4.11	
		Termanfaatnya data dan informasi statistik sektoral.	Laju pemanfaatan data sektoral (%).	55%	70%	80%	
		Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	2.8	3.6	463	

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)


LAMPIRAN
NOMOR : 050/2-3/ DISKOMINFO/2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 - 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET					Definisi	Formula Perhitungan (rumus menghitung realisasi target)	Bidang Penanggung jawab
			Tabun 2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3.01	2.7	2.8	2.9	3.0		=Jumlah total domain/Jumlah 4 area penilaian	Bidang E-Government dan Statistik, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	50	55	70	85	100	Persentase dari pemanfaatan data sektoral	$=\frac{(n+1)-n}{n} \times 100\%$ (n=data tahun awal)	E-Government dan Statistik	
	Tervujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	2.62	3	3	4	4		Perhitungan Indeks KAMI Versi 4.1 = Jumlah total Area penilaian Aspek Indeks KAMI	Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	
	Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah		63	65	67	69		Penilaian Kemenpan RB	Sekretariat	

Pt. PI.KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Dr. ADHARI, S.T., M.E.
Pembina Tingkat I
NIP. 19761123 200212 1 005

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Induk)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. ADHARI, S.T., M.E.
Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUGITO
Jabatan : Pjt. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama


Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

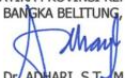
Pangkalpinang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUGITO

PIHAK PERTAMA,
Pjt. KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG,



Dr. ADHARI, S.T., M.E.
Pembina Tingkat I
NIP.19761113 200212 1 005.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	4.20	$= \frac{\text{Jumlah total domain}}{\text{Jumlah 4 area penilaian}}$
2.	Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	80	$= \frac{(n+1)-n/n}{n} \times 100\%$ $(n = \text{data tahun awal})$
3.	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	465	$\text{Perhitungan Indeks KAMI Versi 4.1} = \text{Jumlah total Area penilaian Aspek Indeks KAMI}$

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 4.186.007.200,-	APBD
		b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 4.676.966.500,-	APBD
2.	Laju pemanfaatan data sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 190.999.400,-	APBD

3.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 472.922.630,-	APBD
----	---	---	-------------------	------

Anggaran Penunjang (Kesekretariatan)

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi	Rp. 11.831.791.530,-	APBD

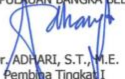
Pangkalpinang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,




SUGITO

PIHAK PERTAMA,
Pjt. KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. ADHARI, S.T., M.E.
Pembina Tingkat I
NIP.19761123 200212 1 005.

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO KURNIAWAN, S.Sos., M.Si
 Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HIDAYAT ARSANI
 Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
 Selaku atasan langsung pihak pertama

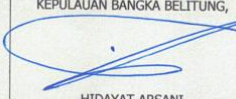
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PANGKALPINANG, November 2025

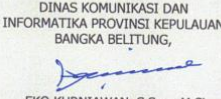
PIHAK KEDUA,
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HIDAYAT ARSANI

PANGKALPINANG, November 2025

PIHAK PERTAMA,
PJT. KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG,



EKO KURNIAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700926 199703 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan	NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Minimalkan Pemfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	4,20	$\frac{\text{Jumlah total domain}}{\text{Jumlah total pegawai}}$	1.	Minimalkan Pemfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	4,20	$\frac{\text{Jumlah total domain}}{\text{Jumlah total pegawai}}$
2.	Terwujudnya data dan informasi statistik sektoral	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	80	$\frac{\text{Jumlah data yang diinput}}{\text{Jumlah data yang tersedia}} \times 100\%$	2.	Terwujudnya data dan informasi statistik sektoral	Laju pemanfaatan data sektoral (%)	80	$\frac{\text{Jumlah data yang diinput}}{\text{Jumlah data yang tersedia}} \times 100\%$
3.	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	465	$\frac{\text{Perubahan Indeks KAMI}}{\text{Jumlah total Area}} \times 100\%$	3.	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	465	$\frac{\text{Perubahan Indeks KAMI}}{\text{Jumlah total Area}} \times 100\%$

*K Untuk Target Kinerja yang SPBE 1 dan lebih diinput secara otomatis oleh sistem SPBE dan SPBE 2024 yang merupakan Target yang ditetapkan.

Anggaran :

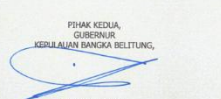
NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 3.988.873.900,- Rp. 4.616.301.100,-	APBD-P APBD-P
2.	Laju pemanfaatan data sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 134.919.900,-	APBD-P
3.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 423.169.052,-	APBD-P

Anggaran Penunjang (Kesekretariatan)

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi	Rp. 10.541.703.012,67,-	APBD-P

PANGKALPINANG, November 2025

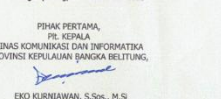
PIHAK KEDUA,
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HIDAYAT ARSANI

PANGKALPINANG, November 2025

PIHAK PERTAMA,
PJT. KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EKO KURNIAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700926 199703 1 007

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 1 Tahun 2025

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Capaian/R esalisasi	Sasaran Program (PK n 3 /Programatik)	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian/R esalisasi	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian/R esalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi.	Indeks Simpan Kelengkapan internal upes	4,2	4,51	Meningkatnya transparansi yang meliputi urusan pemerintahan informasi publik	Perentase masyarakat yang mendapat layanan pemerintahan informasi publik	100	15	Meningkatnya peningkatan pelayanan data/informasi publik penda	Perentase pembaruan informasi (pembukaan/penutupan/kegiatan) dan pengajuan permohonan data/informasi publik yang terkala	80	15
				TW 1				TW 1	35			TW 1	35
				TW 2				TW 2	25			TW 2	25
				TW 3				TW 3	30			TW 3	30
				TW 4	4,2			TW 4	30			TW 4	30
						Meningkatnya ketertarikan informasi, teknologi dan sistem elektronik	Perentase jumlah layanan informasi teknologi dan kapasitas layanan publik pemerintah berbasis e-Government	100	20	Meningkatnya Perentase jumlah aplikasi informasi yang terkala	Perentase PO layanan informasi dan layanan publik yang memuatkan jomban dan subdomain Portal	100	20
								TW 1	35			TW 1	35
								TW 2	25			TW 2	25
								TW 3	30			TW 3	30
								TW 4	30			TW 4	30
										Tercapainya indeks UPSE	Perentase pengant aran yang menggunakan layanan portal data pemerintahan	100	50
												TW 1	50
												TW 2	50
												TW 3	50
												TW 4	50
												TW 1	50
												TW 2	50
												TW 3	50
												TW 4	50
												TW 1	50
												TW 2	50
												TW 3	50
												TW 4	50

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Capaian/R esalisasi	Sasaran Program (PK n 3 /Programatik)	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian/R esalisasi	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian/R esalisasi
		Tercapainya kamuran informasi dalam mendukung penyelenggaraan UPSE	Indeks Kamuran Kamuran Informasi (KAMI)	482/4	483	Meningkatnya tingkat kamuran informasi pemerintah daerah	Perentase tingkat kamuran informasi pemerintah daerah	75	10	Tercapainya Kamuran Informasi	Perentase Pemrosesan Proses Kamuran Informasi Pemerintah	80	15
				TW 1				TW 1	10			TW 1	15
				TW 2				TW 2	10			TW 2	15
				TW 3				TW 3	10			TW 3	15
				TW 4	4			TW 4	10			TW 4	15

Penghabisan: April 2025

PL KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

 BUDHANA, S.P
 NIP. 1980013 198003 1 003

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 2 Tahun 2024

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Capaian/R esalisasi	Sasaran Program (PK n 3 /Programatik)	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian/R esalisasi	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian/R esalisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi.	Indeks Simpan Kelengkapan internal upes	4,2	4,51	Meningkatnya transparansi yang meliputi urusan pemerintahan informasi publik	Perentase masyarakat yang mendapat layanan pemerintahan informasi publik	100	15	Meningkatnya peningkatan pelayanan data/informasi publik penda	Perentase pembaruan informasi (pembukaan/penutupan/kegiatan) dan pengajuan permohonan data/informasi publik yang terkala	80	15
				TW 1				TW 1	35			TW 1	35
				TW 2				TW 2	25			TW 2	25
				TW 3				TW 3	30			TW 3	30
				TW 4	4,2			TW 4	30			TW 4	30
						Meningkatnya ketertarikan informasi, teknologi dan sistem elektronik	Perentase jumlah layanan informasi teknologi dan kapasitas layanan publik pemerintah berbasis e-Government	100	20	Meningkatnya Perentase jumlah aplikasi informasi yang terkala	Perentase PO layanan informasi dan layanan publik yang memuatkan jomban dan subdomain Portal	100	20
								TW 1	35			TW 1	35
								TW 2	25			TW 2	25
								TW 3	30			TW 3	30
								TW 4	30			TW 4	30
										Tercapainya indeks UPSE	Perentase pengant aran yang menggunakan layanan portal data pemerintahan	100	50
												TW 1	50
												TW 2	50
												TW 3	50
												TW 4	50
												TW 1	50
												TW 2	50
												TW 3	50
												TW 4	50

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Capaian/R esalisasi	Sasaran Program (PK n 3 /Programatik)	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian/R esalisasi	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian/R esalisasi
		Tercapainya kamuran informasi dalam mendukung penyelenggaraan UPSE	Indeks Kamuran Kamuran Informasi (KAMI)	482/4	483	Meningkatnya tingkat kamuran informasi pemerintah daerah	Perentase tingkat kamuran informasi pemerintah daerah	75	10	Tercapainya Kamuran Informasi	Perentase Pemrosesan Proses Kamuran Informasi Pemerintah	80	15
				TW 1				TW 1	10			TW 1	15
				TW 2				TW 2	10			TW 2	15
				TW 3				TW 3	10			TW 3	15
				TW 4	4			TW 4	10			TW 4	15

Penghabisan: Juli 2025

PL KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

 BUDHANA, S.P
 NIP. 1980013 198003 1 003

Lampiran 5. Dokumen LHE Akuntabilitas Tahun 2025

